

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, N. (2013). Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Jual Beli) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.
- Andika, H. M. (2016). Kajian Yuridis Uang Wajib Tahunan Otorita Atas Pemberian Hak Milik di Atas Hak Pengelolaan di Kota Batam, 1–18.
- Batam, B. (2012). Pelayanan Perpanjangan UWTO. Retrieved from <http://informasipelayanan.bpbatam.go.id/index.php/component/content/article/86-lahan/140-pelayanan-perpanjangan-uwto>
- Capil. (2015). Data Kependudukan. Retrieved from https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/kependudukan/files/2014/09/rekapauto_2014-12-31_rev03.pdf
- Djuita, R. (P. B. R.). (2011). Menggagas RUU Pertanahan. *Jurnal Pertanahan*, 1(58). <https://doi.org/ISSN 1411-1101>
- Erwiningsih, W. (2011). *Hak Pengelolaan Atas Tanah* (1st ed.). Yogyakarta: Total Media.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya)* (2nd ed.). Jakarta: Djambatan.
- Ismaya, S. (2011). *Pengantar Hukum Agraria* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- KBBI. (2016). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis>
- LAN. (2016). Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah. *Lembaga Administrasi Negara*. Retrieved from <http://dkk.lan.go.id/wp-content/uploads/2016/10/Model-Evaluasi-Pembentukan-Pemekaran-Penggabungan-dan-Penghapusan-Daerah-2007.pdf>
- LBH. (2016). Hak Milik di Atas HPL. Retrieved from <http://www.lembagabantuanhukum.org/pertanahan/hak-milik-di-atas-hpl/>
- Lendrawati and Gusita. (2014). Pelaksanaan Perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita Sampai Dengan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Di Kota Batam, 3, 411–424.

- Limbong, B. (2012). *Hukum Agraria Nasional* (1st ed.). Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Luthfy, M. (2016). Tinjauan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dalam Rangka Kewenangan Kepentingan Pelaksanaan Tugasnya Pada Pemerintah Kota Medan, 1–103.
- Pos, B. (2016). Serifikat Hak Milik di Batam akan di Batalkan. Retrieved from <https://batampos.co.id/2016/11/18/sertifikat-hak-milik-batam-dibatalkan/>
- Pramithasari, K. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah Di Kota Batam (Studi Kasus Nomor : 26/Pdt.G/2011/PN.BTM), 3(2), 174–213.
- Publising, I. L. C. (2010). *Hak Atas Tanah* (2nd ed.). Jakrta: Indonesia Legal Centre Publishing.
- Rahmi, E. (2010). Eksistensi hak pengelolaan atas tanah (hpl) dan realitas pembangunan indonesia. *Dinamika Hukum*, 10(8), 349–360.
- Rangkuti, A. R. (2016). Efektifitas Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kota Batam, 1(2), 131–167.
- Riyanto, A. (2017). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Subrogasi Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Di Kota Batam. *Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693*, 5(1), 1–28.
- Rongiyati, S. (2009). Pemanfaatan hak pengelolaan atas tanah oleh pihak ketiga, 77–90.
- Santoso, U. (2012). Eksistensi hak pengelolaan dalam hukum tanah nasional. *Jurnal Mimbar Hukum*, 187–375.
- Santoso, U. (2013). Penggunaan tanah hak pengelolaan oleh pihak ketiga. *Jurnal Dinamika Hukum*, (September), 283–292.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah* (1st ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Septiani, S. (2016). Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, 1–63.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. (U. Indonesia, Ed.). Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono, S. W. M. (2009). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonmi Sosial dan*

Budaya. Jakarta: Kompas.

Supriadi. (2016). *Hukum Agraria* (7th ed.). Jakarta: Sinar Grafika,.

Suranta, F. A. (2012). *Penggunaan Lahan Hak Ulayat*. Jakrta: Gramata Publishing.

Susanti, D. O. (2017). Urgensi Pendaftaran tanah (Perspektif Utilities dan Kepastian Hukum). *Jurnal Notariil Vol 1, P-ISSN: 2540-797X, 1(2)*, 33–45. <https://doi.org/ISSN 2540-797X>

UT. (2017). Hukum Administrasi Pertanahan (Agraria). Retrieved from <http://www.hukum-ut.id/2017/03/hukum-administrasi-pertanahan-agraria.html>

Wicaksono, W. S. (2016). Sengkarut Masalah Tanah di Batam. Retrieved from https://www.kompasiana.com/wswicaksono/sengkarut-masalah-tanah-di-batam_56e8e924c623bd3c2b0bf34d

Zarqoni, M. M. (2015). *Hak Atas Tanah* (1st ed.). Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2000 tanggal 4 Agustus 2000) Tentang Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang di ubah dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan Selanjutnya yang di cabut dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang di ubah dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2007 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Keputusan Kepala BP Batam Nomor 85 Tahun 2010 Tentang Penetapan Perpanjangan Waktu Alokasi Lahan Dan Tarif Perpanjangan UWTO Untuk Jangka Waktu 20 Tahun Atas Penyerahan Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan OPDIPB Kepada Pihak Ketiga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP Batam, 2012).